



**PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN  
REMBANG**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	11
1.5 Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.2 Rencana Kinerja.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	27
3.3 Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP.....	47
4.1.....	
Kesimpulan.....	47
4.2.....	
Rekomendasi.....	48
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan BPPKAD Kab. Rembang.....	8
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang.....	14
Tabel 2.2.	Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang 2021-2026.....	15
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2023.....	16
Tabel 2.4.	Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun Anggaran 2023.....	17
Tabel 3.1.	Skala Penilaian Realisasi Kinerja.....	25
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2023.....	26
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Capaian Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel .....	27
Tabel 3.4.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023 Capaian Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel .....	28
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel .....	28
Tabel 3.6.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel .....	28
Tabel 3.7.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.....	29
Tabel 3.8.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel .....	29
Tabel 3.9.	Perhitungan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	30
Tabel 4.0.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	31
Tabel 4.1.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023 Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	31
Tabel 4.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	32
Tabel 4.3.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	32
Tabel 4.4.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	32
Tabel 4.5.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	33
Tabel 4.6.	Perhitungan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	34

Tabel 4.7.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	34
Tabel 4.8.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023 Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	35
Tabel 4.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	35
Tabel 5.0.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	35
Tabel 5.1.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	36
Tabel 5.2.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	36
Tabel 5.3.	Perhitungan Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.....	37
Tabel 5.4.	Target dan Realisasi Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 5.5.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023 Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 5.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	38
Tabel 5.7.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	38
Tabel 5.8.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	38
Tabel 5.9.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	39
Tabel 6.0.	Perhitungan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah .....	39
Tabel 6.1.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel 6.2.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023 Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel 6.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	40
Tabel 6.4	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	41
Tabel 6.5	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	41
Tabel 6.6	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	41
Tabel 6.7	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BPPKAD tahun 2023.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1..... Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang .....	5
---	---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/0031/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022- 2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rembang, 29 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197102251998031004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kab./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

### **1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Eksistensi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung kemampuan keuangan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan penataan struktur dan personil yang dilakukan dalam tahun 2023 dan sebagai penjabaran teknis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi utamanya, maka telah dilakukan penyesuaian tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik, ada tiga pilar pokok untuk menyangga terwujudnya *good governance* antara lain *clean government*, profesionalisme personal dan kestabilan masyarakat.

Untuk mengarah pada terwujudnya *good governance* dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan terhadap publik.

Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem dan pembiayaan dengan dukungan personal yang memahami akan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat, visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan, serta pendekatan pelayanan masyarakat itu diharapkan agar tumbuh adanya *feedback* (timbang balik) antara pemerintah dan masyarakat, terutama Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah agar tercipta keselarasan yang aspiratif, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan *income* daerah.

Berbagai hasil yang dicapai tahun 2023, menunjukkan indikasi keseriusan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menuju langkah - langkah pola kerja profesionalisme, efektif dan efisien sesuai yang diharapkan pemerintah dimasa mendatang agar lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yaitu : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati selain sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- b) pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- e) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f) pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5

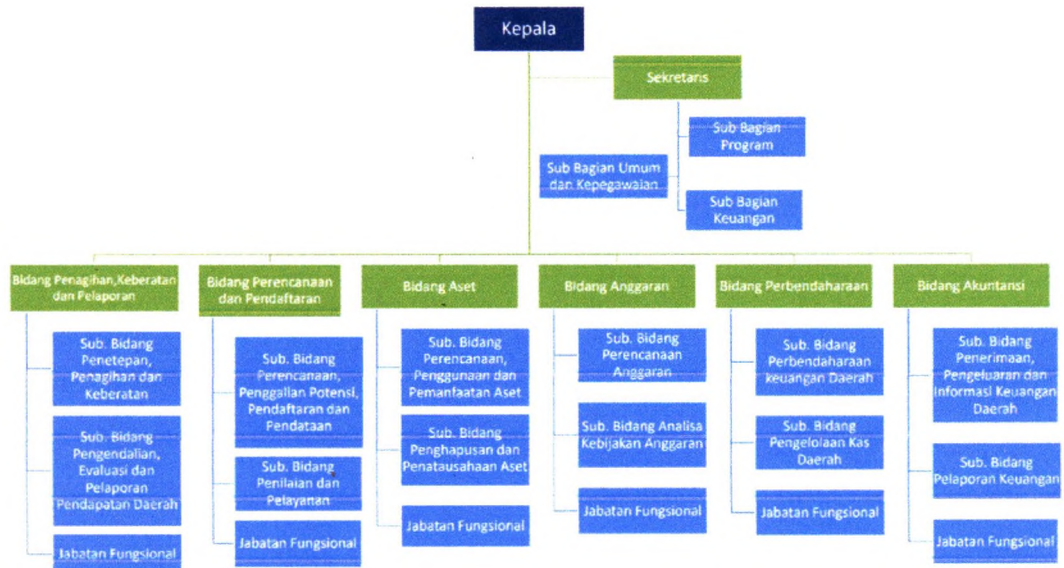
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 Orang Sekretaris, 6 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Sub Bidang, Pelaksana Teknis Badan serta kelompok jabatan fungsional.

Susunan Struktur Organisasi terdiri dari :

- a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b) Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Perencanaan dan Pendaftaran terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan, Penggalian Potensi, Pendaftaran, dan Pendataan;
  2. Sub Bidang Penilaian dan Pelayanan :
- d) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan terdiri dari:
  1. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
  2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- e) Bidang Anggaran terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
- f) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  2. Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah;
- g) Bidang Akuntansi terdiri dari :
  1. Sub Bidang Akuntansi, Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah;
  2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
- e) Bidang Aset terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset ;
  2. Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang**



**1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI & PERMASALAHAN UTAMA**

Berpijak pada nilai strategis keberadaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas, maka peran dalam mendukung Pendapatan, penyediaan keuangan dan aset daerah cukup memiliki arti yang sangat penting dalam struktur pemerintahan di daerah.

Sumber-sumber daya dukung organisasi, tidak akan lepas dari tingkat keberhasilan organisasi, baik dari sisi perangkat hidup, perangkat keras dan perangkat lunaknya.

**A. Kondisi dan Potensi**

**1) Internal**

Keberhasilan organisasi perangkat daerah tidak lepas dari dukungan personil aparat maupun kualitas SDM yang diselaraskan dengan beban kerja yang diembannya.

Jumlah personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 sebanyak 147 orang terdiri dari:

a) Pegawai menurut status

1. PNS : 76 orang
2. P3K : 3 orang
3. Kontrak : 5 orang
4. Harian Lepas : 62 orang

b) Jenis Kelamin

1. Pria : 111 orang
2. Wanita : 36 orang

c) Pendidikan Formal

1. S2 : 13 orang
2. S1 : 60 orang
3. D4 : 1 orang
4. D3 : 6 orang
5. SMA/SMK: 63orang
6. SMP : 3 orang
7. SD : 1 orang

d) Golongan Pangkat

1. Gol IV : 6 orang
2. Gol III : 52 orang
3. Gol II : 18 orang
4. Gol I : 0 orang
5. Gol IX : 3 orang
6. Non Gol./ Kontrak : 67 orang

e) Jabatan

1. Struktural
  - i. Eselon II : 1 orang
  - ii. Eselon III : 6 orang
  - iii. Eselon IV : 15 orang
2. Non struktural: 125 orang

f) Kualifikasi pekerjaan

1. Administrasi : 144 orang
2. Teknis : 3 orang

## 2) Eksternal

Optimalisasi peningkatan PAD selain di dukung langkah - langkah yang inovatif dengan melalui kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga, juga adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.

Dalam Tahun 2023, jumlah Wajib Pajak di daerah Kabupaten Rembang yang tercatat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdiri dari :

- Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan= 27 Wajib Pajak
- Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman= 3.673  
Wajib Pajak
- Wajib Pajak Sarang Burung Walet= 57 Wajib Pajak
- Wajib Pajak Reklame = 1.110 Wajib Pajak
- Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan =100 Wajib Pajak
- Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan= 569 Wajib  
Pajak
- Wajib Pajak BPHTB = 3.425 Wajib Pajak
- Wajib Pajak Air Bawah Tanah = 161 Wajib Pajak
- Wajib Pajak PBB = 408.232 Wajib Pajak
- WajibPBJT atas Jasa Parkir = 71 Wajib Pajak
- Wajib Pajak Air Tanah = 136 Wajib Pajak
- Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik = 1 Wajib Pajak

Sedangkan Wajib Retribusi (WR) yang menjadi kewenangan BPPKAD Kabupaten Rembang terdiri dari :

- Sewa Tanah = 133 Wajib Retribusi
- Rumah Dinas = 85 Wajib Retribusi

Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka alat bukti pemungutan Retribusi Daerah dapat digunakan bentuk dokumen lain yang sah seperti karcis, nota dan sejenisnya.

## 3) Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada tabel 1.1. berikut ini:

**Tabel 1.1.**  
**Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan**  
**BPPKAD Kab. Rembang**

<b>NO.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>
1	2	3	4
	<b>A. Alat-alat Besar</b>	1	182,745,000.00
1	- Portable Generating Set	1	182,745,000.00
	<b>B. Alat-alat Angkutan</b>	83	3,233,082,682.00
1	- Station Wagon	9	2,073,084,863.00
2	- Sepeda Motor	74	1,159,997,819.00
	<b>C. Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	13	1,055,539,900.00
1	- Mesin Bor	1	2,500,000.00
2	- Mesin Pelubang	1	9,850,000.00
3	- Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud	2	1,000,000.00
4	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	9	1,042,189,900.00
	<b>D. Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	1,131	4,736,161,810.50
1	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2,000,000.00
2	- Mesin Ketik Listrik Portable	3	9,100,000.00
3	- Mesin Hitung Listrik	2	2,750,000.00
4	- Mesin Penghitung Uang	3	43,200,000.00
5	- Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	23,910,000.00
6	- Lemari Besi	9	30,197,500.00
7	- Rak Kayu	33	99,218,600.00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI
1	2	3	4
8	- Filling Besi/Metal	23	56,521,000.00
9	- Band Kas	1	31,500,000.00
10	- Lemari Sorok	1	4,240,000.00
11	- Lemari Kaca	7	47,240,000.00
12	- Lemari kayu	5	28,825,000.00
13	- Perkakas Kantor	2	20,627,000.00
14	- Papan Nama Instansi	1	3,233,000.00
15	- Papan Pengumuman	199	174,390,500.00
16	- Overhead Projektor	1	9,115,000.00
17	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	7,225,000.00
18	- Lemari Kayu	11	40,633,000.00
19	- Meja Kayu/Rotan	67	99,848,012.50
20	- Kursi Besi/Metal	53	29,737,600.00
21	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	60	52,224,500.00
22	- Meja Rapat	16	55,792,500.00
23	- Meja Telpon	3	2,415,000.00
24	- Kursi Rapat	118	59,884,480.00
25	- Kursi Tamu	6	33,225,000.00
26	- Kursi Putar	24	21,534,000.00
27	- Bangku Tunggu	5	8,999,925.00
28	- Kursi Lipat	15	5,250,000.00
29	- Meja Komputer	14	13,202,500.00
30	- Mesin Penghisap Debu	2	6,000,000.00
31	- AC Split	31	155,581,000.00
32	- Televisi	10	42,949,000.00
33	- Sound System	1	2,845,000.00
34	- Unit Power Supply	40	115,348,360.00
35	- Stabilisator	1	7,120,000.00
36	- Tangga Alumunium	2	5,320,000.00
37	- Dispenser	3	4,450,000.00

38	- Handy Cam	3	27,370,000.00
39	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	46,633,998.00
40	- Alat Pemadam Portable	3	3,465,000.00
41	- Mainframe	4	116,160,000.00
42	- Mini Komputer	3	2,700,000.00
43	- P.C Unit	40	413,732,390.00
44	- Lap Top	74	753,991,805.00
45	- Note Book	31	314,650,000.00
46	- Personal Komputer Lain-lain	9	84,475,000.00
47	- CPU	1	10,135,000.00
48	- Hard Disk	1	2,750,000.00
49	- Printer	57	367,092,480.00
50	- Scanner	1	6,250,000.00
51	- Monitor	4	13,140,000.00
52	- Printer	34	405,281,460.00
53	- Scanner	5	37,150,000.00
54	- External	2	5,800,000.00
55	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	12	72,522,000.00
56	- Server	8	468,718,700.00
57	- Peralatan Jaringan Lain-lain	10	126,802,500.00
58	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	26,260,000.00
59	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	9,862,500.00
60	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	4	27,044,000.00
61	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2,175,000.00
62	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	12,722,500.00
63	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	22,975,000.00
64	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	650,000.00
	<b>E. Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	33	260,622,498.00
1	- Camera + Attachment	1	4,400,000.00
2	- Proyektor + Attachment	7	88,508,000.00



3	- Microphone/Wireless Mic	11	69,000,000.00
4	- Power Supply Microphone	1	25,000,000.00
5	- Camera Electronic	9	61,679,498.00
6	- Lensa Kamera	1	6,835,000.00
7	- Pesawat Telephone	2	3,700,000.00
8	- Antena SHF/Parabola Portable	1	1,500,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,261</b>	<b>9,468,151,890.50</b>

Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan serta penerapan sistem *E-Government*, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menerapkan Sistem Aplikasi :

- a) SIMPATDA
- b) E-PBB
- c) E-BPHTB
- d) SIPD
- e) SIMDA Keuangan
- f) SIMDA Barang
- g) SIMDA GAJI

Adapun permasalahan utama dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra SKPD;
- 2) Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
- 3) Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

#### **1.4. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003 berisikan dilengkapi dengan isi pelaporan LKjIP terdiri dari BAB I PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama, disusul dengan BAB II PERENCANAAN KINERJA meliputi hal-hal yang menyangkut rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Pada BAB III AKUNTABILITAS KINERJA meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Dan pada bagian PENUTUP tercermin harapan - harapan ke depan yang melatarbelakangi hasil pencapaian kinerja tahun 2023 ini.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, berpedoman pada tiga pilar pokok untuk menyangga terwujudnya *Good Governance* antara lain *Clean Government*, Profesionalisme Personal dan Kestabilan Masyarakat. Untuk mengarah pada terwujudnya *Good Governance* dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan terhadap publik. Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem dan pembiayaan sehingga semua personal memahami akan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat, visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan tujuan , strategi dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel. Indikator Tujuan : Opini BPK Atas LKPD.
2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Tujuan : Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD Kabupaten Rembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1. sebagaimana berikut ini :

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	92,5%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	70%	72,5%
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,84%	18,66%
		Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,94%	3,97%

## 2.2. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Sedangkan berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026, terdapat 5 (lima) indikator kinerja program yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- 5) Persentase Peningkatan PAD

Adapun Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang merupakan proyeksi atas Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 dan Renstra BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2.**  
**Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD**  
**Kabupaten Rembang 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	N/A	90	92,5%	100
3	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	N/A	70	72,5%	80
4	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	16,09%	17,84%	18,66%	21,23%
5	Persentase Peningkatan PAD	%	3,85%	3,94%	3,97%	4,06%

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam periode waktu satu tahun. Dokumen perjanjian kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPPKAD sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Bupati Rembang sebagai pihak ke-dua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan PK BPPKAD berdasarkan pada Rencana Strategis BPPKAD, Rencana Kinerja BPPKAD tahun 2022, IKU BPPKAD. Penetapan Kinerja BPPKAD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3. sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang**  
**Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai SAKIP OPD Indeks Kepuasan Masyarakat	75,14 83
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92,5%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	72,5%
3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,66 %
		Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,97%

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2023 membutuhkan anggaran belanja langsung semula sebesar Rp. 433.700.091.114,- setelah Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 413.240.322.720,- Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BPPKAD untuk melaksanakan program pokok/utama yang berjumlah 4 program utama dan 13 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pokok/utama beserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Program dan Kegiatan BPPKAD**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	75,14	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %	23.244.326.343,00
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	97,5 %	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	97,5%	
		Persentase Capaian Pelayanan Umum	97,5%	
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,5%	
		Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	97,5%	
		Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi Baik	97,5%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %	35.639.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.000.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	4.000.000,00
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	10.639.000,00
1.2	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	97,5 %	19.948.205.003,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	19.757.889.463,00

	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	158.800.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	12.000.000,00
	4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	19.515.540,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memahami Peraturan Perundang-Undangan	97,5 %	81.206.180,00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	62.835.000,00
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	18.371.180,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	97,5 %	498.441.300,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.660.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	101.200.000,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	13.310.830,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	80.191.500,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	191.281.970,00
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000,00
	7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	47.197.000,00
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.600.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,5%	529.555.860,00
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	366.732.000,00
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	40.000.000,00
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 unit	122.823.860,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	97,5 %	1.911.490.000,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.300.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	274.000.000,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.634.490.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana	97,5 %	239.789.000,00



1.7	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi Baik		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	88	143.786.500,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	19.970.000,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	36.032.500,00
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	178	40.000.000,00
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92,5%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	95%	387.428.048.677,00
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100,0 %	
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	92,5%	
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100,0 %	2.371.144.092,00
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100%	
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	581.600.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	110.000.000,00
	3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 dokumen	91.300.000,00
	4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 dokumen	25.000.000,00
	5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 dokumen	41.300.000,00
	6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 dokumen	25.000.000,00
	7. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	9 dokumen	255.800.000,00
	8. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	199.544.092,00
	9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 dokumen	163.000.000,00
	8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 dokumen	103.300.000,00

	9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 dokumen	430.000.000,00
	10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 dokumen	165.000.000,00
	11. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	40 orang	180.300.000,00
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	100% 95%	822.500.000,00
	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	128.412.800,00
	2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 dokumen	59.600.000,00
	3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	113.687.200,00
	4. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 dokumen	53.600.000,00
	5. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	298.085.000,00
	6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40 Dokumen	64.215.000,00
	7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	42 Dokumen	41.000.000,00
	8. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	63.900.000,00
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100% 100%	424.703.940,00
	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	10.244.800,00

	2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	5.570.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	3.700.000,00
	4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	256 Laporan	260.320.800,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	27.391.940,00
	6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	1.256.600,00
	7. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	6.750.000,00
	8. Pembinaan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	58 Orang	103.079.800,00
	9. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.390.000,00
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurnya Bankeu, Belanja Tidak terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	91,5%	383.809.700.645,00
	1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	5.000.000.000,00
	2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	141 Laporan	364.514.710.696,00
	3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.607.187.000,00
	4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	574 Laporan	12.687.802.949,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	72,5%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan	100,0 % 100,0%	500.390.000,00
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal  Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	91,5%  95% 3 Dokumen	

	1. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	62.187.000,00
	2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	28.190.000,00
	3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	40 Laporan	59.000.000,00
	4. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	40 Laporan	202.061.000,00
	4. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	40 Laporan	21.285.000,00
	5. Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	47.250.000,00
	6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	69.090.000,00
	7. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	11.327.000,00
	<b>MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,66%	
	<b>MENINGKATNYA PENERIMAAN PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	Persentase Peningkatan PAD	3,97%	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer Persentase Realisasi Penerimaan PAD	2,5% 92,5% 100%	2.067.557.700,00
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	5% 85%	
	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen	20.527.500,00
	2. Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	264.517.450,00
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	294 Laporan	568.109.000,00
	4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	300 Laporan	197.978.750,00
	5. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	251.000.000,00
	6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	250 Objek Pajak	68.345.000,00
	7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	250 Dokumen	208.800.000,00

	8. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	600 Dokumen	365.700.000,00
	9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	16 Dokumen	122.580.000,00
	<b>JUMLAH</b>			<b>413.240.322.720,00</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah perwujudan kewajiban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisa dan evaluasi akuntabilitas kinerja, realisasi anggaran, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala. Adapun pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala penilaian realisasi kinerja pada tabel 3.1. berikut :

**Tabel 3.1.**

**Skala Penilaian Realisasi Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 100	Sangat Baik
2	85- 100%	Baik
3	65- 84,99%	Cukup
4	50- 64,99%	Kurang
5	≤ 50 %	Sangat Kurang

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2023 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang**  
**Tahun Anggaran 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2023		Capaian			Renstra	
			Target	Realisasi	2023	2022	2021	Target Akhir 2026	Capaian (%) s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama dalam Renstra BPPKAD 2021-2026)	Nilai SAKIP OPD	75,14	76	101,09%	99%	84,55%	86	88,37%
		Nilai IKM PD	83	90,1	108,49%	96%	100%	82,64	109,03%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92,5%	95,15%	102,86%	104,18%	N/A	100%	95,15%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	72,5%	96,82%	133,54%	136,9%	N/A	80%	121,03%
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,66%	18,05%	96,73%	107,45%	133%	21,23%	85,02%
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	3,97%	-3,14%	-0,79%	-0,03%	624,15%	4,06%	-77,34%
<b>Rata - Rata</b>					<b>86,48%</b>	<b>89,7%</b>	<b>285,71%</b>		

Dari hasil pengukuran capaian pada tahun anggaran 2023 atas 5 (lima) indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja menunjukkan katagori Baik dengan persentase capaian diatas 85%, serta 1 indikator menunjukkan angka < 50% yaitu sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2023 sebesar 87,13% dibandingkan rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2022 sebesar 89,7%.



### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### A.1. Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel

##### 1) Indikator Tujuan/ Sasaran 1. Opini BPK atas LKPD

Ketercapaian Indikator Tujuan/Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel” yaitu “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Pada tanggal 12 Mei 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah secara akuntabel meskipun masih ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah telah memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sehingga dapat dinilai Capaian atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Tujuan 1. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”

**Tabel 3.3.**  
**Target dan Realisasi**  
**Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan**  
**Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPK	WTP	WTP	100	Baik	Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 nomor 136/S/XVIII.SMG/05/2023

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2021 sd 2023 untuk capaian tujuan 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023  
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan  
Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 1 tersebut diatas pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan  
Target Akhir Renstra 2021-2026  
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan  
Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.

**Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja  
Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan  
Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut: - Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan pada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 788.033.000.000,	Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang antara lain agar memerintahkan: - Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggung jawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkana ke Kas Daerah sebesar Rp. 788.033.000.000,-

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan anggaran dan manajemen kas tidak optimal yang mengakibatkan tertunda dan/atau tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berikutnya dan;</li> <li>- Perhitungan utang belanja, jalan, irigasi dan jaringan pada DPUTARU belum diverifikasi secara memadai yang mengakibatkan nilainya belum memiliki dasar pengakuan yang jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengusulkan APBD memperhatikan prioritas belanja dan capaian realisasi pendapatan sehingga apabila terjadi deficit APBD masih dalam batas kapasitas fiskal daerah dan;</li> <li>- Kepala DPUTARU selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan perhitungan progress pekerjaan sesuai kondisi lapangan sebagai dasar pengakuan utang belanja, jalan, irigasi dan jaringan atas paket pekerjaan yang masih dalam proses penyelesaian dan putus kontrak, yang selanjutnya dilakukan review oleh Inspektorat dan hasilnya disampaikan ke BPK.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---	--

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7.**  
**Analisis Penggunaan Sumber Daya**  
**Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	100	424.703.940,00	416.004.650,00	98%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.8.**  
**Analisis Program Penunjang Keberhasilan**  
**Capaian Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan Tepat Waktu	95%	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan	Persentase Pencatatan	100%	Menunjang

				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggung jawaban APBD	100%	Menunjang
--	--	--	--	---	--	------	-----------

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target.

## **A.2. Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

### **1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sasaran 1. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ” mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel” yaitu “ Opini BPK Atas LKPD”. Sasaran 1. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ” pada tahun 2023 terdiri dari satu indikator yaitu “Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” yang diukur dengan menghitung (1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%.

Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dihitung dengan perincian sebagai berikut =

**Tabel 3.9.**

**Perhitungan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Perhitungan	Penjelasan	Jumlah	Total	Sumber data
1	1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Perda No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2023 ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 24 Oktober 2023, ini berarti tepat waktu, karena ditetapkan sebelum 31 Oktober 2023. Perda No 5 Tahun 2023 tentang APBD 2024 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023, ini berarti tepat waktu karena	100%	$=(100\%+90,46\%+95\%)$ 3 $=95,15\%$	Perda No 3 Tahun 2023 dan Perda No 5 Tahun 2023

			ditetapkan sebelum 31 Desember 2023.			
2	1/3 Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = Realisasi belanja daerah 2023/Anggaran Belanja Daerah 2023 x100% = 1.821.399.922.394,58 / 2.013.287.394.562 x100% = 90,46%		90,46%		LRA Unaudited 2023
3	1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kualitas baik	38 OPD dari total 40 OPD= 95%		95%		LRA Unaudited 2023

Penjelasan diatas menerangkan bahwa dinilai Capaian atas Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 95,15%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Sasaran 1. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”

**Tabel 4.0.**  
**Target dan Realisasi**  
**Capaian Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92,5%	95,15%	102,86%	Baik	Perda No 3 Tahun 2023 dan Perda No 5 Tahun 2023, LRA 2023 Unaudited

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2021 sd 2023 untuk capaian tujuan 1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023**  
**Capaian Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	N/A	N/A	90%	93,76%	104,18%	92,5%	95,15%	102,86%

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 1 tersebut diatas pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan**  
**Target Akhir Renstra 2021-2026**  
**Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	102,86%	92,5%	100%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja**  
**Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92,5%	95,15%	102,86%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD didasarkan pada antara lain komitmen OPD lain dan proses pembahasan di DPRD yang memakan waktu lama.</li> <li>- Dalam serapan belanja daerah, ada 2 OPD yang belum terserap maksimal belanja daerahnya, dikarenakan faktor - faktor internal eksternal selama kurun waktu 2023.</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami kendala khususnya pada 2 OPD, yang mengakibatkan tidak sesuai tepat waktu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPPKAD selaku PPKD berkoordinasi dengan OPD lain dan DPRD dalam rangka menetapkan Perda APBD dan Perubahan APBD agar tepat waktu.</li> <li>- Berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Serapan Belanja OPD setiap triwulan.</li> <li>- Melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD.</li> </ul>

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4..**  
**Analisis Penggunaan Sumber Daya**  
**Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92,5%	95,15%	102,86%	387.003.344.737	385.492.451.345	99,60%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 4.5.**

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan  
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	102,86%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100%	Menunjang
					Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang telah ditetapkan	99,7%	Menunjang
					Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	92,5%	Menunjang
				Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindak lanjuti	100%	Menunjang
					Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	100%	Menunjang
					Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	99%	Menunjang
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Banku, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target.

**A.2. Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel**

**2. Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Sasaran 2. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ” mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel” yaitu “ Opini BPK Atas LKPD”. Sasaran 2. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ” pada tahun 2023 terdiri dari satu indikator yaitu “Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” yang diukur dengan menghitung (1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD) + (1/3 Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD) x 100%

Persentase Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dihitung dengan perincian sebagai berikut =

**Tabel 4.6.**  
**Perhitungan Indeks Pengelolaan BMD**

No	Perhitungan	Penjelasan	Jumlah	Total	Sumber data
1	1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD	Kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap rencana pengelolaan BMD = 96,77%	96,77	$= \frac{(96,77 + 93,68)}{3} + 100$ =96,82	Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2023
2	1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD	Ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD = 37 OPD dari total 40 OPD= 93,68%	92		Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2023
3	1/3 Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD	Keterlambatan pengajuan perpanjangan tertib administrasi pemindahtanganan BMD= 25 dari 25 dokumen pemindahtanganan BMD= 100%	95		Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2023

Penjelasan diatas menerangkan bahwa nilai Capaian atas Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar 96,82%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Sasaran 2. “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Tabel 4.7.**  
**Target dan Realisasi**  
**Capaian Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	72,5	96,82	133,08%	Baik	Data Pemanfaatan Aset yang Habis Tahun 2023



Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2021 sd 2023 untuk capaian sasaran 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8.**

**Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023  
Capaian Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	N/A	N/A	70	95,83	136,90%	72,5	96,82	133,08%

Dikarenakan Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah baru ada di Renstra BPPKAD 2021- 2026, maka untuk perhitungan tahun 2021 belum ada capaian, target dan realisasinya.

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 tersebut diatas pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9.**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026  
Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	96,82	72,5	133,08%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.0.**

**Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja  
Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	72,5	96,82	133,08%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keabaian wajib retribusi dalam proses administrasi pemanfaatan barang milik daerah.</li> <li>- Pergantian personil pengurus barang pada masing-masing OPD.</li> <li>- Kekurangcakapan personal pada OPD yang ditunjuk sebagai pengurus barang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan surat konfirmasi atas pemanfaatan barang milik daerah yang akan habis 4 (empat) bulan sebelumnya.</li> <li>- Melakukan koordinasi secara intensif atas pengurus barang pada OPD, khususnya yang sering ada pergantian personal pengurus barang.</li> <li>- Melakukan pembinaan dan pendampingan dan pengawasan pada pengurus barang OPD.</li> </ul>

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**

**Analisis Penggunaan Sumber Daya**  
**Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	72,5	96,82	133,08%	500.390.000,00	445.844.700,00	89%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 5.2.**

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan**  
**Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	133,54%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel	100%	Menunjang
					Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan	96,77%	Menunjang
				Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	100%	Menunjang
					Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	100%	Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target.

## B. Tujuan 2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

### 1) Indikator Tujuan: Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Tujuan 2 “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah” yaitu “Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%.

Proporsi dihitung dengan perincian sebagai berikut =

**Tabel 5.3.**  
**Perhitungan Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah**

No	Perhitungan	Penjelasan	Hasil	Sumber data
1	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah/Pendapatan Daerah} \times 100\%}{= \frac{342.018.778.222,57}{1.895.224.108.262,57} \times 100\% = 18,05}$	Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2023= 342.018.778.222,57 Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 =1.895.224.108.262,57	18,05%	LRA Unaudited per 31 Desember 2023

Penjelasan diatas menerangkan bahwa nilai Capaian atas Indikator Tujuan 2 adalah sebesar 18,05%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Tujuan 2. “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah” sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 5.4.**  
**Target dan Realisasi**  
**Capaian Tujuan 2: Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	18,66 %	18,05%	96,73%	Baik	LRA Unaudited per 31 Desember 2023

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2021 sd 2023 untuk capaian tujuan 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.**  
**Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023**  
**Capaian Tujuan 2: Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	16,09 %	21,40%	133%	17,84 %	19,17%	107,47%	18,66%	18,05%	96,73%

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 2 tersebut diatas pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan**  
**Target Akhir Renstra 2021-2026**  
**Capaian Tujuan 2: Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	18,05%	18,66%	96,73%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.7.**  
**Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja**  
**Capaian Tujuan 2: Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	18,66%	18,05%	96,73%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan inovasi dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Pengkinian data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi</li> <li>- Melakukan pembaharuan data khususnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan</li> <li>- Mempersiapkan pembuatan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerjasama dengan vendor dalam melakukan pencatatan alat rekam transaksi elektronik (tapping box) pada Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Rembang.</li> <li>- Pemeliharaan sistem E-BPHTB dan E-PBB.</li> <li>- Melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjahmada terkait penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan</li> <li>- Melaksanakan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjahmada terkait pembuatan Naskah Akademik Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.8.**  
**Analisis Penggunaan Sumber Daya**  
**Capaian Tujuan 2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	18,66%	18,05%	96,73%	2.067.557.700	2.001.234.402	96,79%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 5.9.

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan  
Capaian Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	107,47%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  Kegiatan: Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Persentase harmonisasi perencanaan pendapatan transfer Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	100%  100%  114,12%	Menunjang  Menunjang  Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target.

### **B. Tujuan 2. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

#### **1) Sasaran 3: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Sasaran 3 “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” yaitu mendukung tujuan 2 “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah”, dengan indikator yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023- Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022) dibagi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 kemudian dikali 100%.

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan perincian sebagai berikut =

**Tabel 6.0.  
Perhitungan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah**

No	Perhitungan	Penjelasan	Hasil	Sumber data
1	$(\text{Pendapatan Asli Daerah 2023} - \text{Pendapatan Asli Daerah 2022}) / \text{Pendapatan Asli Daerah 2022} \times 100\% = (342.018.778.222,57 - 353.094.781.382,53) / 353.094.781.382,53 \times 100\% = - 3,14\%$	Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 per 31 Desember 2023 = 342.018.778.222,57 Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 = 353.094.781.382,53	- 3,14 %	LRA Unaudited per 31 Desember 2023

Penjelasan diatas menerangkan bahwa nilai Capaian atas Sasaran 3 adalah sebesar - 3,14%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Sasaran 3. “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1.**  
**Target dan Realisasi**  
**Capaian Sasaran 3: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,97%	-3,14%	-0,79%	Sangat kurang	LRA Unaudited per 31 Desember 2023

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2021 sd 2023 untuk capaian tujuan 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2.**  
**Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd 2023**  
**Capaian Sasaran 3: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,85%	24,03%	624,15	3,94%	- 0,12%	- 0,03%	3,97%	-3,14%	-0,79%

Untuk perbandingan realisasi kinerja tujuan 2 tersebut diatas pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.3.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan**  
**Target Akhir Renstra 2021-2026**  
**Capaian Sasaran 3: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-3,14	3,97%	-0,79%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.4.**  
**Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja**  
**Capaian Sasaran 3: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,97%	-3,14%	-0,79%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pandemi COVID 19 dan juga perang Rusia- Ukraina mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut menurun</li> <li>- Masih adanya piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terselesaikan</li> <li>- Kurang optimalnya potensi yang bisa digali dari berbagai sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- Tingginya target Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan stimulus/hadiah kepada wajib pajak yang tercapat dalam rangka pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan</li> <li>- Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Rembang dalam hal menyelesaikan masalah piutang pajak daerah yang belum terselesaikan.</li> <li>- Melakukan kegiatan pendataan dan penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- Melakukan perencanaan penghitungan target Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan nilai pada tahun-tahun sebelumnya</li> </ul>

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.5.**  
**Analisis Penggunaan Sumber Daya**  
**Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	3,97%	-3,14%	-0,79%	2.067.557.700,00	2.001.234.402,00	96,79%	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 6.6.**  
**Analisis Program Penunjang Keberhasilan**  
**Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli	Persentase Peningkatan Pendapatan	13%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	Persentase Peningkatan Wajib	96,79%	Menunjang

	Daerah	Asli Daerah		DAERAH Kegiatan: Pengelolaan pendapatan Daerah	Pajak Daerah Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah	100%	Menunjang
--	--------	-------------	--	--	---	------	-----------

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 belum mencapai batas maksimal dalam pemenuhan target.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, pada tahun anggaran 2023 BPPKAD Kabupaten Rembang melaksanakan realisasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 6.7.**

**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BPPKAD tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.244.326.343	16.983.477.606	84,08%
	1 .Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.639.000	31.426.000	94,66%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	12.911.900	98,98%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	5.649.600	97,29
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	3.794.900	97,21%
	d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.639.000	9.069.600	88,11%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.948.205.003	13.820.042.917	81,54%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.757.889.463	13.632.074.417	81,10%
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.800.000	158.300.000	96,83%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	10.383.600	98,88%
	d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.515.540	19.284.900	99,44%
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.206.180	81.196.400	98,63%
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.835.000	62.835.000	98,82%
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.371.180	18.361.400	97,99%
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.441.300	467.125.050	99,42%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.660.000	6.655.500	99,93%



	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.200.000	98.336.300	98,91%
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.310.830	13.133.050	99,74%
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.191.500	73.773.000	99,93%
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	191.281.970	171.130.000	99,59%
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	5.950.000	87,67%
	g. Penyediaan Bahan/Material	47.197.000	45.643.600	100,00%
	h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.600.000	52.503.600	99,81%
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	529.555.860	507.390.822	98,71%
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	366.732.000	353.010.822	99,02%
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	37.830.000	96,91%
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.823.860	116.550.000	94,89%
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.911.490.000	1.841.970.518	96,22%
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.102.000	69,23%
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.000.000	272.427.079	86,59%
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.634.190.000	1.566.441.439	97,93%
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.789.000	234.325.899	99,81%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	143.786.500	139.870.399	99,75%
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.970.000	19.925.000	99,93%
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.032.500	35.934.000	99,99%
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	38.596.500	99,78%
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	387.428.048.677	385.908.455.995	99,62%
	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.371.144.092	2.237.502.500	95,24%
	a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	581.600.000	535.630.000	95,64%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	110.000.000	101.608.500	96,60%
	c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	91.300.000	91.241.900	99,75%
	d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	19.961.600	79,84%
	e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	41.300.000	41.184.900	99,94%
	f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	22.541.000	90,16%
	g. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	255.800.000	248.494.000	96,83%
	h. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	199.544.092	190.030.000	98,03%
	i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	163.000.000	144.950.400	98,99%

	j.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	103.300.000	102.184.500	93,13%
	k.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	430.000.000	414.961.400	89,24%
	l.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	165.000.000	155.604.500	99,80%
	m.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	180.300.000	169.109.800	88,66%
	2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	822.500.000	801.284.200	94,23%
	a.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	128.412.800	128.380.100	94,32%
	b.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	59.600.000	55.410.200	92,97%
	c.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	113.687.200	110.376.800	96,81%
	d.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	53.600.000	52.210.000	75,94%
	e.	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	298.085.000	290.723.200	94,75%
	f.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	64.215.000	62.634.700	96,24%
	g.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	41.000.000	39.984.700	97,52%
	h.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	63.900.000	61.564.500	99,29%
	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	424.703.940	416.004.650	93,63%
	a.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	10.244.800	10.244.800	84,23%
	b.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	5.570.000	5.506.600	96,93%
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3.700.000	3.693.300	53,71%
	d.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	260.320.800	257.494.300	98,10%
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	27.391.940	23.585.400	88,59%
	f.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1.256.600	1.243.500	98,95%
	g.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	6.750.000	6.750.000	87,76%

	h. Pembinaan Akuntansi, pelaporan, Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	103.079.800	101.773.300	92,32%
	i. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	6.390.000	6.376.000	98.11%
	4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	383.809.700.645	382.453.664.645	99,67%
	a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	50,20%
	b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	364.514.710.696	363.626.147.196	99,94%
	c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.607.187.000	1.198.000.000	72,41%
	d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12.687.802.949	12.629.517.449	100,00%
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	500.390.000	445.844.700	96,47%
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	500.390.000	445.844.700	96,47%
	a. Penyusunan Standar Harga	62.187.000	61.133.500	97.64%
	b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	28.190.000	23.092.000	99,18%
	c. Penatausahaan Barang Milik Daerah	59.000.000	51.931.500	96,96%
	d. Pengamanan Barang Milik Daerah	202.061.000	198.208.200	99.45%
	e. Penilaian Barang Milik Daerah	21.285.000	17.237.500	94.88%
	f. Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	47.250.000	17.333.500	92.00%
	g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	69.090.000	66.027.500	91.07%
	h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	11.327.000	10.881.000	96.93%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.067.557.700	2.001.234.402	91,76%
	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.067.557.700	2.001.234.402	91,76%
	a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20.527.500	18.347.500	92.06%
	b. Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	264.517.450	253.871.500	94.79%
	c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	568.109.000	566.265.160	97.05%
	d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	197.978.750	184.400.271	82,40%
	e. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	251.000.000	243.749.400	77,89%
	f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 45a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB	68.345.000	61.796.600	87.83%
	g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	208.800.000	199.859.300	86.65%
	h. Penagihan Pajak Daerah	365.700.000	355.942.671	92,80%
	i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	122.580.000	117.002.000	92.86%
	<b>JUMLAH</b>	413.240.322.720	405.339.012.705	98.08%

Dari total anggaran senilai Rp. 413.240.322.720, yang terealisasi sejumlah Rp. 405.339.012.705, sehingga capaian sebesar 98,08%, ini berarti capaian anggaran BPPKAD selama kurun waktu 2023 terhitung baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun. Dalam Renstra tahun 2021- 2026, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menetapkan 2 Tujuan dan 5 sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk mencapai sasaran, maka ditetapkan kebijakan dan program - program dijabarkan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap - tiap tahun bertahap. Tiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan evaluasi hasil kinerja untuk mengetahui keberhasilan program dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan analisa atas realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan karena rata-rata indikator kinerjanya lebih dari 86,48% dan masuk pada kategori baik. Keberhasilan ini bukan suatu hal yang mudah diperoleh, karena dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak dijumpai hambatan yang cukup serius, antara lain efek pandemic dan krisis Ukraina Rusia, serta ketidakdisiplinan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan maupun asset milik daerah.

Sehubungan dengan pencapaian kinerja 86,48%, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang berusaha untuk meningkatkan kinerjanya lebih maksimal lagi agar kedepan capaian kinerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya dan agar dapat mempertahankan pada kategori sangat tinggi atau diatas 90%. Strategi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak/retribusi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan sumber daya aparat daerah. Koordinasi antar Badan/instansi mengenai aset / barang milik daerah. Sedangkan strategi yang terkait dengan program / kegiatan, pada tahun 2023 lebih diprioritaskan pada program / kegiatan yang indikator capaian kinerjanya ditahun sebelumnya masih rendah.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

Email: bppkad.rembang@gmail.com, website: bppkad.rembangkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 01 November 2023

Pihak Kedua

  
H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

Pihak Pertama

  
FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197102251998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN REMBANG (PERUBAHAN)**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tujuan:</b>		
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	18,66%
<b>2.</b>	<b>Sasaran:</b>		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92,5%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	72,5
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,97
<b>3.</b>	<b>Direktif Pimpinan</b>		
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	75,14
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD	83

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 23.244.326.343	APBD Kab.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 387.428.048.677	APBD Kab.
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 500.390.000	APBD Kab.
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.067.557.700	APBD Kab.
<b>J U M L A H</b>		Rp 413.240.322.720	

Rembang, 01 November 2023

**BUPATI REMBANG**

  
**H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

  
**FERY SUMARDI, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197102251998031004





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114  
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSWANDI, S.H.

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 1 November 2023

Pihak Kedua



**FERY SUMARDI, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIR 197102251998031004

Pihak Pertama



**KUSWANDI, S.H.**  
Pembina  
NIP 196709031994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
PLT. SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	75,14
		Nilai IKM OPD	83

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 35.369.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 19.948.205.003	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 81.206.180	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 498.441.330	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 529.555.860	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.911.490.000	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 239.789.000	APBD
<b>J U M L A H</b>		Rp. 23.244.326.343	APBD


Rembang, 1 November 2023

Pihak Kedua



**FERY SUMARDI, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP-197102251998031004

Pihak Pertama



**KUSWANDI, S.H**  
Pembina  
NIP 196709031994031001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114  
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:



Nama : KUSWANDI, SH  
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran pada BPPKAD  
Kabupaten Rembang  
Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA.

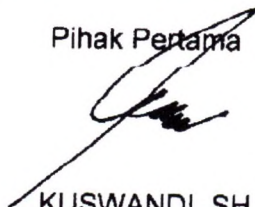
Nama : FERY SUMARDI, SE, MM.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 01 November 2023

Pihak Kedua  
  
  
**FERY SUMARDI, SE, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197102251998031004

Pihak Pertama  
  
**KUSWANDI, SH**  
Pembina  
NIP 196709031994011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN  
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan PAD	3,97%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.119.477.700	APBD

Rembang, 01 November 2023

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197102251998031004

Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pendaftaran BPPKAD  
Kabupaten Rembang

KUSWANDI, SH  
Pembina

NIP 196709031994011001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURROHMAH, SE. MAP  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan  
pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., MM  
Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

\* Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 1 Nopember 2023

Pihak Kedua  
  
FERY SUMARDI, SE., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710225 199803 1 004

Pihak Pertama  
  
NURROHMAH, SE. MAP  
Pembina  
NIP. 19710802 199803 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	70%
2	Tersusunnya Bankeu, BTT dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase Bankeu BTT dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	70%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan pengelolaan pebendaharaan kas daerah	Rp. 822.500.000	APBD
2. Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	Rp. 383.809.700.645	APBD

Rembang, 1 Nopember 2023

Kepala Bidang Perbendaharaan  
BPPKAD Kabupaten Rembang




NURROHMAH, SE. MAP

Pembina

NIP. 19710802 199803 2 002



Kepala BPPKAD  
Kabupaten Rembang

  
FERY SUMARDI, SE., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710225 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114  
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARNI, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan pada BPPKAD Kabupaten Rembang  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.


Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 01 November 2023

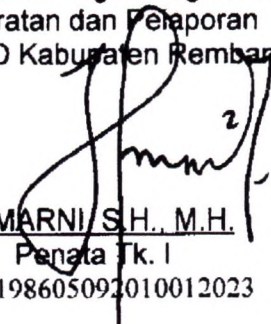
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



→

FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197102251998031004

Kepala Bidang Penagihan,  
Keberatan dan Pelaporan  
BPPKAD Kabupaten Rembang



SUMARNI, S.H., M.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 198605092010012023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
KEPALA BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN  
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Terealisasinya Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	18,66 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 948.080.000	APBD

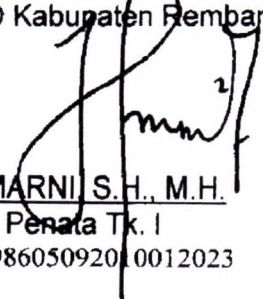
Rembang, 01 November 2023

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



  
FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197102251998031004

Kepala Bidang Penagihan,  
Keberatan dan Pelaporan  
BPPKAD Kabupaten Rembang



SUMARNI S.H., M.H.  
 Penata Tk. I  
 NIP. 198605092010012023





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 693124, 691114, 691002  
Fax. (0295) 693124, 691002 Rembang 59212  
Email : [bppkad@rembangkab.go.id](mailto:bppkad@rembangkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRODIN, SE., MM  
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., MM  
Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 01 November 2023

Pihak Kedua



FERY SUMARDI, SE., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710225 199803 1 004

Pihak Pertama

ASRODIN, SE., MM  
Pembina  
NIP. 19710820 199503 1 004

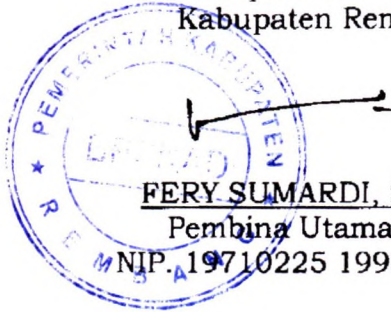
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
KEPALA BIDANG ASET BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerah Baik/ Tertib dan Akuntabel	100%

Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 500.390.000	APBD

Rembang, 01 November 2023

Kepala BPPKAD  
Kabupaten Rembang



**FERY SUMARDI, SE., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710225 199803 1 004

Kepala Bidang Aset BPPKAD  
Kabupaten Rembang

**ASRODIN, SE., MM**  
Pembina  
NIP. 19710820 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114  
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMADI, SH  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Rembang  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., M.M.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 01 Nopember 2023

PIHAK KEDUA



FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197102251998031004



PIHAK PERTAMA



SUMADI, S.H.  
Pembina  
NIP 197005201993031006

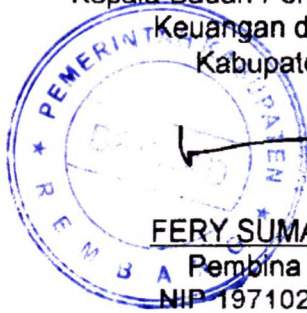
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Persentase Rancangan Perda APBD yang disampaikan Tepat Waktu	Persentase Rancangan Perda APBD yang disampaikan Tepat Waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 2.371.144.092	APBD

Rembang, 01 Nopember 2023

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Rembang



**FERY SUMARDI, SE., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197102251998031004

Kepala Bidang Anggaran  
BPPKAD Kabupaten Rembang

**SUMADI, SH**  
Pembina  
NIP 197005201993031006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114  
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA



FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197102251998031004

PIHAK PERTAMA



ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.  
Penata Tk. I  
NIP 197302192003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)  
 KEPALA BIDANG AKUNTANSI  
 PADA BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan waktu dalam penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD. 2. Pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran perangkat daerah sesuai SAP dan tepat waktu	1 dokumen  41 laporan

Program		Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	424.703.940	APBD

Rembang, 01 November 2023

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan  
 Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197102251998031004

Kepala Bidang Akuntansi  
 BPPKAD Kabupaten Rembang

ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.  
 Penata Tk. I  
 NIP. 197302192003121005



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 12 Mei 2023

Nomor : 136/S/XVIII.SMG/5/2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Bupati Rembang  
di  
Rembang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp906,94 juta;
2. Pelaksanaan anggaran dan manajemen kas tidak optimal yang mengakibatkan tertunda dan/atau tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran berikutnya; dan
3. Perhitungan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada DPUTARU belum diverifikasi secara memadai yang mengakibatkan nilainya belum memiliki dasar pengakuan yang jelas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang agar memerintahkan antara lain:

1. Kepala OPD terkait selaku PA untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp788,33 juta (Rp906,94 juta – Rp118,61 juta);
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengusulkan APBD memperhatikan prioritas belanja dan capaian realisasi pendapatan sehingga apabila terjadi defisit APBD masih dalam batas kapasitas fiskal daerah; dan
3. Kepala DPUTARU selaku PA untuk melakukan perhitungan *progress* pekerjaan sesuai kondisi lapangan sebagai dasar pengakuan utang belanja jalan, irigasi, dan jaringan atas paket pekerjaan yang masih dalam proses penyelesaian dan putus kontrak, yang selanjutnya dilakukan reuiu oleh Inspektorat dan hasilnya disampaikan ke BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 49A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 49B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 10 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan,



Hans Wijaya, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.